



**IDENTIFIKASI DAMPAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
BENTANG PESISIR PADANG TIKAR KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA**

*(Identification of the Impact of Village Forest Management on Economic Improvement of the
Bentang Pesisir Padang Tikar, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency)*

Dedy Setiawan, Gusti Hardiansyah, Ganjar Oki Widhanarto

Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak. Jl. Daya Nasional Pontianak 78124

Email : olongking3@gmail.com

Abstract

Village forests are state forests that are managed by the village and used for the welfare of the village and are not encumbered with permits or rights. Village forest operations are carried out by the Village Forest Management Board (LPHD) which is formed and structured under the leadership of the village. This study aims to find out the village forest management on the economic improvement of the community carried out by the LPHD and analyze the economic situation of the community before and after the establishment of the Village Forest Management Rights (HPHD). The research was conducted in Bentang Pesisir Padang Tikar, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency. Sampling of respondents using the Probability Sampling method uses the Slovin formula to determine the number of respondents. The data analysis used was income analysis, to determine village forest management based on linkert scale. The role of LPHD in village forest management is at a moderate level of 4 (Village) and good 6 (Village) with an average in the good category (3.66). Based on the results of the analysis of 70 respondents where previously residents in Bentang Pesisir Padang Tikar had an income of Rp 2,524,800,000/year and after the establishment of HPHD community income was Rp.2.923,200,000/year with an average income. each respondent before HPHD amounting to Rp. 36,205.704/year and after HPHD increased by Rp.41.760,000/year. Based on the data, of course in the economic aspect, the impact resulting from village forest management has not changed significantly.

Keyword : Economic Situation, Management, Village Forest

Abstrak

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak. Oprasional hutan desa dilakukan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) yang dibentuk dan secara struktural berada dibawah pimpinan desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan hutan desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LPHD serta menganalisis kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan setelah ditetapkannya Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Penelitian dilaksanakan di Bentang Pesisir Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Pengambilan sampel responden menggunakan metode Probability Sampling dengan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis pendapatan, untuk mengetahui pengelolaan hutan desa dengan berdasarkan skala linkert. Peran LPHD dalam pengelolaan hutan desa berada pada tingkatan cukup 4 (Desa) dan baik 6 (Desa) dengan rata-rata dalam kategori baik (3,66). Berdasarkan hasil analisis dari 70 responden dimana sebelumnya masyarakat di Bentang Pesisir Padang Tikar memiliki pendapatan Rp.2.524.800.000/tahun dan setelah ditetapkannya HPHD pendapatan masyarakat sebesar Rp.2.923.200.000/tahun dengan rata-rata pendapatan per responden sebelum HPHD sebesar Rp.36.205.704/tahun dan setelah HPHD mengalami peningkatan sebesar Rp.41.760.000/Tahun.



Berdasarkan data tersebut tentunya dalam aspek ekonomi, dampak yang dihasilkan dari pengelolaan hutan desa tidak memiliki perubahan yang cukup signifikan.

Kata kunci : Hutan Desa, Kondisi Ekonomi, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat karena mampu menghasilkan barang dan jasa serta dapat menciptakan kestabilan lingkungan. Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Artinya bahwa masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Mengelola mempunyai makna lingkup yang lebih luas, bukan sekedar memanfaatkan sumber daya hutan yang ada tetapi lebih bertanggung jawab atas kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (Hapsari *et al.*, 2014).

Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.83 tahun 2016, Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Operasional hutan desa dilakukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang dibentuk dan secara struktural berada dibawah pimpinan desa.

Bentang Pesisir Padang Tikar memiliki luas ± 135.545 ha. Sedangkan ± 76.370 ha merupakan kawasan yang diperuntukan untuk dikelola masyarakat melalui skema Hutan Desa. Hutan Desa terbagi lagi ke dalam Hutan Lindung seluas ± 69.299 ha, Hutan Produksi

Terbatas seluas ± 1.985 ha dan Hutan Produksi Konversi seluas 5.086 ha. Secara administrasi, terbagi ke dalam wilayah administrasi 10 Desa yaitu Desa Tanjung Harapan, Ambarawa, Sungai Besar, Sungai Jawi, Tasik Malaya, Padang Tikar Satu, Medan Mas, Nipah Panjang, Teluk Nibung dan Desa Batu Ampar. Sejak ditetapkannya surat keputusan pada tahun 2017 sampai sekarang pengurus lembaga (LPHD) beserta masyarakat sekitar hutan dapat mengakses dan mengelola hutan desa sesuai dengan kebijakan yang berlaku, hal ini telah ditetapkan berdasarkan SK MenLHK tahun 2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada 10 Lembaga Pengelola Hutan Desa di Bentang Pesisir Padang Tikar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan hutan desa yang dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa terhadap peningkatan ekonomi dan menganalisa kondisi ekonomi masyarakat Bentang Pesisir sebelum dan setelah ditetapkannya Hak Pengelolaan Hutan Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Bentang Pesisir Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan pada 1 Maret 2021 sampai 1 April 2021. Pengambilan sampel responden pada penelitian ini penulis menggunakan metode *Probability Sampling* dengan



menggunakan rumus *Slovin* (1960) untuk menentukan jumlah responden.

$$(n = \frac{N}{1+N(e)^2})$$

Dimana :

n = Jumlah sampel yang diambil

N = Populasi

E = Standar error (0,1)

Populasi penelitian ini adalah seluruh Anggota LPHD pada 10 desa di Bentang Pesisir Padang Tikar dengan jumlah total keseluruhan 237 orang. Dari perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus *Slovin* maka didapatkan 70 sampel penelitian di Bentang Pesisir Padang Tikar.

Jumlah sampel responden yang diambil pada masing-masing desa dapat ditentukan dengan menggunakan metode *stratifikasi berimbang* (Tekon, 1965).

$$(nh = \frac{Nh}{N} n)$$

Dimana :

Nh = Jumlah responden dalam 1 (satu) desa

n = Jumlah sampel seluruhnya

Nh = Jumlah anggota LPHD dalam 1 (satu) desa

N = Jumlah sampel seluruhnya

Penentuan anggota responden pada setiap desa yang telah didapat dilakukan secara acak sehingga diperoleh sesuai jumlah sampel yang dibutuhkan.

Analisis Pendapatan

Untuk mengetahui jumlah pendapatan masyarakat terhadap pengelolaan hutan desa sebelum

ditetapkan HPHD dan setelah ditetapkannya HPHD dengan menggunakan analisis menurut (Soekartawi, 2002).

Pdk = TR – TC

TR = Q . P

TC = FC + VC

Dimana :

Pdk = Pendapatan Masyarakat BPPT (Rp/Kg/Thn)

TR = (Penerimaan Total) (Rp/Kg/Thn)

TC = Total Cost (Biaya Total) (Rp/Kg/Thn)

TR = Penerimaan Total (Rp/Kg/Thn)

Q = Jumlah Produksi (Kg/Ton/Thn)

P = Harga Produksi (Rp/Kg/Ton)

TC = Biaya Total (Rp/Kg/Thn)

FC = Biaya Tetap Produksi (Rp/Kg/Thn)

VC = Biaya Variabel Produksi (Rp/Kg/Thn)

Pengelolaan Hutan Desa

Data pengelolaan Hutan Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LPHD menggunakan skala linkert dengan memberikan skoring dari setiap jawaban responden (Dawes, 2008). Kriteria penilaian dari pengelolaan hutan desa yang dilakukan oleh LPHD adalah akses terhadap hutan, pemanfaatan hutan, tingkat partisipasi dan monitoring dan evaluasi. Kriteria penilaian data pengukuran dapat disajikan pada Tabel 1.



Tabel 1. Kriteria Penilaian Data Pengukuran (*Measurement Data Evaluation Criteria*)

Tingkat Keaktifan	Skor	Interval Skor
Sangat Baik (SB)	5	81-100%
Baik (B)	4	61-80%
Cukup (C)	3	41-60%
Buruk (B)	2	21-40%
Sangat Buruk (SB)	1	0-20%

Setelah didapat skor dari jawaban responden, selanjutnya di tentukan interval skor Pengelolaan Hutan Desa terhadap peningkatan ekonomi dengan perhitungan seperti diuraikan pada rumus berikut.

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Responden}}{\text{Total Jumlah Responden}} \times 100\%$$

Tabel 2. Identitas Responden Berdasarkan Usia Responden, Tingkat Pendidikan dan Mata Pencaharian (*Identity of Respondents Based on Respondent's Age, Education Level and Sustenance*)

Identitas Responden	Kategori	Responden (Orang)	Persentase (%)
Usia Responden	a. <30 tahun	3	4
	b. 31-39 tahun	23	33
	c. 40-49 tahun	22	32
	d. 50-60 tahun	19	27
	e. >60 tahun	3	4
Tingkat Pendidikan	a. SD/ sederajat	14	20
	b. SMP/ sederajat	31	44
	c. SMA/ sederajat	21	30
	d. S-1	4	6
Mata Pencaharian	a. Petani	45	64
	b. Petani dan Nelayan	14	20
	c. Nelayan	5	7
	d. Karyawan Swasta	6	9

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 70 responden yang terpilih di Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar diperoleh identitas responden berdasarkan usia responden dan tingkat pendidikan responden sebagai berikut :

Usia Responden

Masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar yang mengelola hutan desa menunjukkan rata-rata 30 tahun sampai 50 tahunan dengan rincian 30-39 tahun menunjukkan persentase 33% dengan 23 responden, 40-49 tahun menunjukkan persentase 32% dengan 22 responden

dan usia 50-59 tahun menunjukkan persentase 27% dengan 19 responden

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMP, sebanyak 31 responden dengan persentase 44% dan yang paling sedikit adalah S-1 sebanyak 4 responden dengan persentase 6%.



Berdasarkan analisis data yang dilakukan tingkat pendidikan yang paling banyak mengelola hutan desa adalah SMP, SMA, SD kemudian S-1. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden pada masanya susah untuk menempuh pendidikan baik itu karena faktor ekonomi, sosial dan juga akses jarak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal tersebut tentu berbeda dengan masa sekarang.

Mata Pencaharian

Mata pencaharian mayoritas adalah petani sebanyak 45 responden dengan persentase 64%, petani dan nelayan sebanyak 14 responden dengan persentase 20%, nelayan sebanyak 5 responden dengan persentase 7%, dan karyawan swasta sebanyak 6 responden dengan persentase 9%. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap mata pencaharian masyarakat komoditas pertanian seperti padi, jagung dan hortikultura (budidaya tanaman kebun), serta komoditas perkebunan yang dikembangkan seperti kelapa dalam, kopi, pinang dan lain-lain. Masyarakat yang mata pencaharian sebagai nelayan tangkap dilaut umumnya menangkap ikan, udang dan kepiting yang merupakan kegiatan nelayan secara turun temurun dari pengalaman orang tua mereka terdahulu. Sedangkan mata

pencaharian masyarakat sebagai karyawan swasta adalah yang bekerja di kantor desa sebagai staff atau anggota pengurus desa

Pengelolaan Hutan Desa Di Bentang Pesisir Padang Tikar

Pengelolaan hutan yang baik tentu saja berperan besar dalam aspek peningkatan ekonomi masyarakat. Kelembagaan memiliki peran vital dalam pengelolaan hutan desa. Kelembagaan didefinisikan sebagai suatu aturan main (system rule of the game), norma, kebiasaan, dan tata hubungan di antara orang-orang atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap penting (Ruhimat, 2016).

Dalam pengelolaan hutan, ada beberapa aspek yang diamati pada penelitian ini yaitu akses terhadap hutan, pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan monitoring evaluasi pengelolaan hutan desa, maksud dari akses dalam penelitian ini adalah jalan atau kegiatan untuk melakukan interaksi terhadap hutan. Hasil data pengukuran pengelolaan hutan desa dengan menggunakan skala linkert disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengelolaan Hutan Desa di Bentang Pesisir Padang Tikar (Village Forest Management in Bentang Pesisir Padang Tikar)

Nama Desa	Responden	Variabel				
		Akses Hutan	Pemanfaatan Hutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Pengelolaan Hutan
Batu Ampar	7	3,92 (B)	3,32 (C)	2,71 (C)	3,54 (C)	3,37 (C)
Teluk Nibung	6	4,66 (SB)	3,16 (C)	2,79 (C)	3,22 (C)	3,45 (C)
Nipah Panjang	6	4,75 (SB)	3,33 (C)	2,77 (C)	3,5 (C)	3,58 (B)
Medan Mas	5	5 (SB)	3,65 (B)	3,22 (C)	4,03 (B)	3,97 (B)
Padang Tikar 1	8	4,18 (B)	3,46 (C)	3,4 (C)	4,18 (B)	3,80 (B)
Tasik Malaya	9	4,83 (SB)	3,66 (B)	3,19 (C)	3,9 (B)	3,89 (B)
Sungai Besar	6	5 (SB)	3,54 (C)	2,87 (C)	3,63 (B)	3,76 (B)
Sungai Jawi	9	4,6 (SB)	2,97 (C)	2,7 (C)	2,96 (C)	3,30 (C)
Ambarawa	6	4,83 (SB)	4,08 (B)	3,07 (C)	3,97 (B)	3,98 (B)
Tanjung Harapan	8	4,75 (SB)	3,62 (B)	2,86 (C)	2,95 (C)	3,54 (C)
Total	70	46,52	34,79	29,58	35,88	36,69
Rata-rata		4,652 (SB)	3,479 (C)	2,958 (C)	3,588 (B)	3,66 (B)

Sumber : Hasil analisis data, 2021

Akses Hutan

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3 menunjukkan tingkat keaktifan akses terhadap hutan rata-rata masyarakat desa dalam kategori sangat baik dengan skala skor 4,65. Akses terhadap hutan disini meliputi seberapa sering masuk kedalam hutan dan siapa saja yang dapat mengakses hutan di desa artinya masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar rata-rata menunjukkan sangat sering masuk kedalam hutan dan semua masyarakat dapat mengakses hutan yang ada di desa. Hal ini dibuktikan pada Tabel 3, menunjukkan bahwa tingkat keaktifan masyarakat terhadap akses hutan sangat baik 8 (Desa) dan baik 2 (Desa)

Pemanfaatan Hutan

Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan hutan yang ada di Bentang Pesisir Padang Tikar yang masih aktif antara lain madu dan produk turunan kelapa. Produk turunan kelapa antara lain sabut (tali, jaring, media tanam, dan pupuk

kompos), tempurung (briket arang), daging buah (crude oil,minyak goreng dan santan), dan air kelapa (coco jelly). Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa ada 6 (Desa) pada tingkat cukup dan 4 (Desa) pada tingkat baik. LPHD menjadi faktor kunci dalam pemanfaatan hutan, karna fungsi LPHD selain mengarahkan masyarakat tetapi juga sebagai penggerak agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar desa. Rata-rata masyarakat desa pada pemanfaatan hutan berada pada kategori cukup dengan skala skor 3,47 artinya masyarakat tahu akan pentingnya pemanfaatan hutan untuk keberlangsungan kehidupan mereka.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan pada pengambilan bagian dalam sebuah pembangunan pengelolaan hutan. Partisipasi juga merupakan faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan pengelolaan



hutan desa dengan azas lestari yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Partisipasi mencakup keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pengelolaan hutan desa dalam merencanakan kegiatan di hutan desa. Partisipasi di Bentang Pesisir Padang Tikar meliputi tingkat keaktifan dalam pengelolaan hutan desa, tingkat keikutsertaan masyarakat, melakukan sosialisai tentang pengelolaan hutan desa, penandaan batas areal kerja hutan desa, restorasi dan rehabilitasi kawasan hutan, perlindungan areal kerja hutan desa, dan pembuatan sarana prasarana pengelolaan hutan desa. Menurut analisis data pada Tabel 3 dilihat bahwa dari 10 desa yang mengelola hutan desa tingkat partisipasi berada pada kategori cukup, dengan rata-rata skala skor 2,93 (cukup). Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat cukup terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan desa.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengukur kinerja pelaksanaan suatu program untuk mengawasi kegiatan yang sudah direncanakan apakah sudah tepat dalam perencanaannya dan juga menilai apakah pengelolaan hutan desa sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan (Abdian, 2015). Monitoring dan evaluasi tentang hutan desa sebagian besar masyarakat desa melakukan rapat koordinasi terkait tentang pengelolaan hutan desa. Berdasarkan analisis data pada Tabel 3 bahwa 5 (Desa) berada pada tingkatan cukup dan 5 (Desa) berada pada tingkatan baik. Masyarakat di Bentang Pesisir Padang Tikar rata-rata dalam kategori baik (3,58) dalam

melakukan rapat koordinasi, dan tidak pernah terjadi konflik di dalam pengelolaan hutan desa. Artinya masyarakat sering melakukan rapat koordinasi tentang pengelolaan hutan desa. Kegiatan koordinasi tentang pengelolaan hutan desa meliputi sosialisasi peraturan dalam pengelolaan hutan desa, melakukan evaluasi dampak sosial, ekonomi, budaya dan melakukan monitoring dan evaluasi hutan desa di lapangan sering dilakukan oleh masyarakat.

Pengelolaan Hutan

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3, peran LPHD dalam pengelolaan hutan desa di 10 desa berada pada tingkat yang cukup 4 (desa) dan baik 6 (desa). Pengelolaan Hutan Desa di BPPT rata-rata berada pada tingkatan yang baik (3,66), hal ini tentunya Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang memiliki pengaruh penting dalam 4 aspek variabel pengelolaan hutan yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam pengelolaan hutan desa. Dalam aspek berkelanjutan, kondisi pengelolaan hutan yang masih dikatakan cukup optimal menjadi tantangan sekaligus ancaman serius dalam pengelolaan 10 izin hutan desa. Masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPHD dalam pengelolaan hutan desa seperti aspek partisipasi LPHD dan masyarakat yang dikatakan cukup antara baik dan buruk. Tanjung (2017), mengatakan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan ikut serta dalam pengamanan dan perlindungannya untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yaitu Esensi dari program



Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Dengan kata lain, sesuai dengan modul pelaksanaan pengelolaan PHBM oleh Kementerian Kehutanan, partisipasi masyarakat merupakan fitur kunci dari keberhasilan program PHBM. Dengan konsep baru tersebut, PHBM terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dampak positif tersebut dapat berupa peningkatan penghasilan masyarakat, meningkatkan kelestarian lingkungan hutan, menurunkan kasus pembalakan liar, dan berkurangnya lahan kosong karena peran aktif masyarakat dalam mengolah lahan dan melakukan reboisasi.

Menurut Supratman (2013) pengelola Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng, berkat kegiatan komunikasi dan koordinasi yang difasilitasi oleh LSM lokal seperti BALANG SulSel dan FKMM Sulsel, enam desa secara swadaya belajar di lokasi Hutan Desa yang telah mendapatkan hak kelola Hutan Desa dan telah mengusulkan juga areal kawasan hutan di desanya sebagai kawasan Hutan Desa (pada enam desa tersebut) dan dua desa lagi telah mengusulkan kawasan hutan di desanya sebagai areal Hutan Kemasyarakatan (HKm). Walaupun Forum Rembug Hutan Desa juga telah dibentuk sejak tahun 2010, namun kelembagaan pengelolaan pengetahuan ini juga secara swadaya dikerjakan oleh masyarakat sipil lainnya seperti LSM lokal dan juga mulai

bangkitnya peran dan dukungan pemerintah Kabupaten dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya. Selama hampir dua tahun (2010-2011), BALANG Sulsel mendinamisir pengorganisasian masyarakat dengan usaha-usaha mandiri dengan dukungan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng, Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dan Badan Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa Kabupaten Bantaeng. Kelembagaan pengelolaan pengetahuan kemudian mulai mendapatkan sistemnya secara alami dan terus mengalami berevolusi. Yang paling penting adalah adanya aktor-aktor lokal baik yang diperankan oleh Kepala Desa, Direktur BUMDes dan atau LSM Balang yang secara bergantian memainkan peran dalam melakukan aktifitas-aktifitas pengelolaan pengetahuan.

Kondisi Ekonomi Masyarakat di Bentang Pesisir Padang Tikar

Kondisi ekonomi masyarakat dilihat dari pendapatan masyarakat dan kondisi pendapatan yang diperhitungkan dari pengelolaan hasil dari hutan desa untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan setelah ditetapkannya Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) menurut analisis (Soekartawi, 2002).

Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dari 70 responden yang mewakili Bentang Pesisir Padang Tikar didapatlah kondisi ekonominya. Perbandingan di antara keduanya disajikan pada Tabel 4.



Tabel 4. Kondisi Ekonomi Masyarakat sebelum dan setelah ditetapkannya Hak Pengelolaan Hutan Desa (*The Economic Condition of the Community before and after the establishment of the Village Forest Management Right*).

Nama Desa	Responden	Sebelum (Rp/Bulan)	Sebelum (Rp/Tahun)	Setelah (Rp/Bulan)	Setelah (Rp/Tahun)
Tasik Malaya	9	22.000.000	264.000.000	21.950.000	263.400.000
Batu Ampar	7	22.300.000	267.600.000	12.000.000	144.000.000
Teluk Nibung	6	18.500.000	222.000.000	30.000.000	360.000.000
Nipah Panjang	6	18.500.000	222.000.000	22.500.000	270.000.000
Medan Mas	5	17.700.000	212.400.000	29.200.000	350.400.000
Tanjung Harapan	8	21.000.000	252.000.000	9.150.000	109.800.000
Padang Tikar 1	8	28.800.000	336.000.000	42.000.000	504.000.000
Sungai Jawi	9	22.900.000	274.800.000	22.000.000	264.000.000
Ambarawa	6	18.500.000	222.000.000	27.800.000	333.600.000
Sungai Besar	6	21.000.000	252.000.000	27.000.000	324.000.000
Jumlah	70	211.200.000	2.524.800.000	243.600.000	2.923.200.000
Rata-rata		3.017.142	36.205.704	3.480.000	41.760.000

Sumber : Hasil analisis data, 2021

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat sebelum dan setelah ditetapkannya hak pengelolaan terhadap hutan tidak memiliki dampak perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil analisis dari 70 responden dimana sebelumnya masyarakat di Bentang Pesisir Padang Tikar memiliki pendapatan Rp.2.524.800.000/tahun dan setelah ditetapkannya Hak Pengelolaan Hutan Desa pendapatan masyarakat sebesar Rp.2.923.200.000/tahun dengan rata-rata pendapatan per responden sebelum HPHD sebesar Rp.36.205.704/tahun dan setelah HPHD mengalami peningkatan sebesar Rp.41.760.000/Tahun. Berdasarkan data tersebut tentunya dalam aspek ekonomi, dampak yang dihasilkan dari pengelolaan hutan desa tidak terlalu besar.

Sebelum kawasan hutan di Bentang Pesisir Padang Tikar ditetapkannya sebagai areal kerja hutan desa, masyarakat telah memanfaatkan hutan tersebut sejak lama namun setelah mendapat hak pengelolaan hutan desa, masyarakat lebih

mengembangkan terkait tentang pengelolaan hasil hutan. Seperti contoh sebelum ditetapkannya hak pengelolaan hutan desa masyarakat melakukan produksi madu secara liar, tetapi sesudah ditetapkannya hak pengelolaan hutan desa masyarakat membentuk kelompok usaha dari hutan desa yang disebut Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengelola usaha produksi madu secara lebih optimal. Tidak hanya madu saja yang dikelola kelompok masyarakat ini, produk turunan dari kelapa juga menjadi lebih optimal dalam pengelolaannya.

Kondisi Pendapatan

Analisis data pada Tabel 4 di lihat bahwa hanya 6 (Desa) yang pendapatan masyarakat setelah HPHD meningkat, hal itu disebabkan oleh keadaan usaha kelompok yang dikelola masyarakat meningkat, meskipun dari segi pengelolaan hutan desa yang sudah optimal tidak menjadi tolak ukur dalam peningkatan ekonomi tersebut. Kurangnya akses terhadap pasar yang kurang baik, kurangnya modal usaha dan minim



pendampingan menjadi kendala dalam menjalan usaha kelompok tersebut. Namun, untuk keadaan yang sekarang ini, walaupun pengelolaan hutan desa berada pada kategori baik, kemungkinan yang akan datang untuk aspek ekonomi dapat meningkat.

Peningkatan terbesar masyarakat didapat dari pengelolaan kebun kelapa yang lokasinya masuk kedalam areal kerja hutan desa dengan hasil yang berupa briket arang, minyak kelapa, kelapa bulat, santan kelapa, sabut kelapa dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan madu kelulut juga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat di desa sekitar areal kerja hutan desa sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Terdapat beberapa jenis aktifitas masyarakat yang dilakukan di dalam maupun dekat disekitar areal kerja hutan desa, yakni mencari ikan, kepiting, udang, kepah, mencari hasil hutan dan bertanam padi.

Kegiatan sebagai nelayan ditentukan pada kondisi keadaan air pasang-surut (bahasa setempat : nyorong dan konda) dengan tata waktu berganti setiap minggunya. Lokasi bagi nelayan untuk mencari hasil dari perairan tersebut tersebar di sekitar pesisir sungai, lebih ke arah laut hingga selat Kalimantan. Sementara itu mencari ikan dan udang umumnya dilakukan di sungai dengan cara memasang jaring, bubu dan memasang perangkap kepiting di sisi tepi sekitar hutan bakau. Selain bertani dan mencari ikan, masyarakat juga mencari hasil hutan, seperti kayu untuk bahan membuat/memperbaiki rumah, membuat

perabot rumah tangga, peralatan kerja (tangkai parang/kapak, dayung, dsb), atau membuat perahu. Hasil hutan bukan kayu antara lain madu, buah-buahan seperti langsung, durian, cempedak, daun nipah dan lain-lain

Masyarakat desa-desa di sekitar areal kerja hutan desa Bentang Pesisir Padang Tikar pada umumnya terbelakang secara ekonomi, meskipun sumberdaya alam tersedia melimpah di sekitar mereka. Struktur kepemilikan dan atau penguasaan lahan yang tidak merata telah membentuk struktur sosial di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang lahannya sempit atau tidak memiliki lahan, kehidupan ekonomi rumah tangganya sangat tergantung kepada mereka yang memiliki lahan yang luas. Masyarakat yang memiliki lahan luas menempati struktur sosial yang lebih tinggi atas mereka yang tidak memiliki lahan, karena adanya ketergantungan ekonomi dalam bentuk bagi hasil (taseng), gadai (sanra), atau buruh tani. Struktur ini menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki lahan sulit untuk meningkatkan ekonomi rumah tangganya (Supratman *et al.*, 2013).

Faktor-faktor seperti terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses faktor produksi dan mengakses pasar, tidak tersedianya kelembagaan masyarakat yang kuat untuk dapat mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan, infrastruktur fisik yang terbatas juga menjadi faktor penyebab masyarakat lemah dalam pemanfaatan terhadap hutan desa. Oleh karena itu diperlukan penguatan-penguatan masyarakat yang dilakukan secara bertahap, konsisten, dan terus menerus.



Menurut penelitian Senoaji (2011) tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan lindung Bukit Daun menyatakan bahwa komoditas utama petani adalah kopi. Hasil pertanian lainnya umumnya digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu pendapatan petani di Bukit Daun ditentukan oleh produksi kopi dan harga jual kopi. Pendapatan masyarakat yang memproduksi kopi tidak tetap, kadang meningkat drastis kadang pula turun drastis. Produksi rata-rata kopi per tahun adalah 500 kg per hektar. Pendapatan masyarakat dari kebun di dalam kawasan hutan rata-rata sebesar Rp.9.857.000/tahun per kepala keluarga, dan dari luar kawasan hutan Rp.8.812.500. Rata-rata jumlah jiwa per kepala keluarga di desa penelitian adalah 5,3 sehingga pendapatan per kapita masyarakatnya sekitar Rp.1.863.200 dari lahan hutan dan Rp.1.662.735 dari lahan di luar hutan. Nilai pendapatan ini didasarkan kepada harga kopi sebesar Rp.15.000/kg. Pada harga sebesar ini, kehidupan masyarakatnya dapat dikategorikan cukup sejahtera.

Pendapatan masyarakat Bukit Daun tentu berbeda dengan masyarakat di Bentang Pesisir Padang Tikar. Masyarakat Bukit Daun pendapatan utamanya hanya dari kebun kopi saja sedangkan masyarakat di BPPT pendapatan utamanya didapat dari berbagai jenis salah satunya adalah kebun kelapa yang memiliki pendapatan yang cukup besar. Hal ini tentunya adalah faktor dari pengelolaan hutan yang dilakukan oleh lembaga terkait, semakin baik pengelolaan hutan yang dilakukan akan semakin

meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat

KESIMPULAN

Pengelolaan hutan desa yang dilakukan oleh LPHD untuk mengetahui peningkatan ekonomi dilihat dari beberapa aspek variabel yang diamati yaitu akses terhadap hutan rata-rata berada pada tingkatan sangat baik (4,65), pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh LPHD dan masyarakat rata-rata berada pada tingkatan cukup (3,47), tingkat partisipasi masyarakat rata-rata berada pada tingkatan cukup (2,95) dan monitoring evaluasi pengelolaan hutan desa rata-rata berada pada tingkatan baik (3,58), dengan keseluruhan dalam pengelolaan hutan berada pada tingkatan cukup 4 (Desa) dan baik 6 (Desa) dengan rata-rata berada pada tingkatan baik (3,66). Hal ini menunjukkan bahwa LPHD dalam mengelola hutan desa terhadap peningkatan ekonomi berperan penting dilihat dari 4 aspek, mampu dalam melaksanakan atau meningkatkan pengelolaan hutan desa.

Berdasarkan hasil analisis dari 70 responden dimana sebelumnya masyarakat di Bentang Pesisir Padang Tikar memiliki pendapatan Rp.2.524.800.000/tahun dan setelah ditetapkannya HPHD pendapatan masyarakat sebesar Rp.2.923.200.000/tahun dengan rata-rata pendapatan per responden sebelum HPHD sebesar Rp.36.205.704/tahun dan setelah HPHD mengalami peningkatan sebesar Rp.41.760.000/Tahun. Berdasarkan data tersebut tentunya dalam aspek ekonomi, dampak yang dihasilkan dari pengelolaan hutan desa tidak memiliki perubahan yang cukup signifikan.



Peningkatan terbesar masyarakat didapat dari pengelolaan kebun kelapa yang lokasinya masuk kedalam areal kerja hutan desa dengan hasil yang berupa briket arang, minyak kelapa, kelapa bulat, santan kelapa, sabut kelapa dan lain sebagainya. Pengelolaan madu kelulut juga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Terdapat beberapa jenis aktifitas masyarakat yang dilakukan di dalam maupun dekat disekitar areal kerja hutan desa, yakni mencari ikan, kepiting, udang, kepah, mencari hasil hutan dan bertanam padi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdian, RP. Slamet, BY. Halimanto, Rudi. 2015. Pengelolaan Hutan Rakyat Oleh Kelompok Pemilik Hutan Rakyat di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*. Vol 3. No 2 :99-112
- Dawes J. 2008. Do data characteristics change according to the number of scale points used? An experiment using 5 point, 7 point and 10 point scales. *Internasional Jurnal of Market Research* 10 (1)
- Hapsari, Evita. M, Nurhaedah. 2014. *Hutan Desa Kabupaten Bantaeng Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat*. Balai Penelitian Kehutanan Masyarakat. Makasar. Vol. 11 No 1 :27-36
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016
- Ruhimat, IS. 2016. *Faktor Kunci Dalam Pengembangan Kelembagaan Agroforestry Pada Lahan Masyarakat*. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry
- Senoaji, Gunggung. 2011. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu. *Sosiohumaniora*. Vol 13. No 1 :1-17
- Slovin. M. J. 1960. Sampling, Simon and Schuster Inc. New York.
- Soekartawi. 2002. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta (ID) : UI-Press
- Supratman. Sahide AK. 2013. *Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng*. Kerjasama Kemerntrian Kehutanan dan Kemitraan. Jakarta : Direktorat Bina Perhutanan Sosial
- Tanjung NS. Sadono, Dwi. Wibowo CT. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatra Barat. *Jurnal Penyuluhan*. Vol.13 No.1 :14-30
- Teken. I. B. 1965. *Teknik Sampling*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.